

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2014 KOTA
SEMARANG TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN,
GELANDANGAN, DAN PENGEMIS**

Oleh :

Arif Kurnia Ardi Pradana, Margaretha Suryaningsih

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Sudharto S. H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Fax (024) 7476405

Laman :<http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research aimed to clarify the role of the Stakeholders involved in implementing the policy on the handling of street children, hemeless, and beggars in the city of Semarang and explained the driving factor and a barrier to the implementation effort handling of street children, the homeless and beggars in the City of Semarang. Research methods uses qualitative exploration, the approach data collection with techniques observation, interviews, and study of the document. Informants in this study is the social service of the Semarang City, the NGO Yayasan Emas Indonesia, former street children, as well as the community. Data were analyzed with the theory of "5 appropriate in the implementation of the policy" form Riant Nugroho and Van Meter Van Horn "policy implementation process model Van Meter Van Horn". The research results showed that the current goals expected by the Government in handling the street children, the homeless, and beggars have not achieved because the policy contained in the regulation of those areas have not been able to overcome the existing problems and there are still constraints in its implementation. Nevertheless, the Regulation of this area has grown to be carried out properly by the Social Service of the Semarang City as executor using a preventative approach & rehabilitation and assisted by Satpol PP as well as from Foundations/NGOs. A recommendation could be made to improve the performance of the implementation is the addition of the supporting resources implementation, sustainable empowerment, counseling, socialization, the number of logging, as well as the passage of the regulations the Mayor as a technical guide in the implementation.

Keywords : Implementation, goals, resources, communication between organizations, Agency Characteristics, Social, Economic and Political, Disposition of the implementation.

Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 Kota Semarang Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kota di segala bidang tampaknya tidak hanya memberikan nuansa positif bagi kehidupan masyarakat tetapi juga melahirkan persaingan hidup sehingga muncul fenomena kemiskinan. Adanya krisis yang berakibat banyak orang tua mengalami kesulitan ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja, jumlah lapangan pekerjaan di daerah kurang, sedangkan di perkotaan lapangan pekerjaan dianggap lebih menarik, mendorong masyarakat di daerah mencoba untuk mengadu nasibnya ke kota besar. Bagi mereka yang mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup mereka mampu bertahan. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang belum beruntung serta kurang memiliki bekal keterampilan terpaksa mereka mencari kegiatan agar dapat menghasilkan uang untuk membantu ekonomi orang tuanya dengan turun ke jalan. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di kota-kota besar.

Masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis saat ini telah menjadi bagian kehidupan yang tidak bisa lepas di kota

besar maupun kecil. Permasalahan ini nampaknya perlu mendapat perhatian secara khusus. Seperti halnya kota-kota lain, Semarang juga merasakan fenomena berupa anak jalanan, gelandangan, dan pegemis.

Adapun data yang diperoleh dari Publikasi “Kota Semarang Dalam Angka 2014” mengenai Permasalahan Kesejahteraan Sosial Kota Semarang termuat dalam Tabel 1.1.

Permasalahan Kesejahteraan Sosial di Kota Semarang 2013

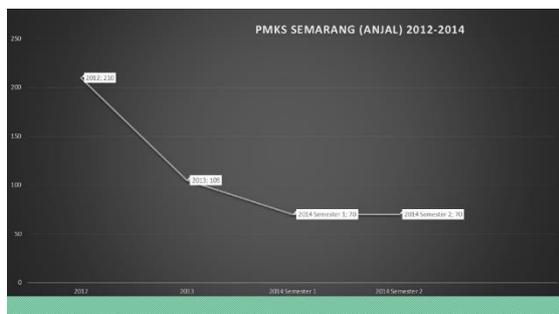
	Kecamatan`	Jumlah
	Mijen	37
	Gunungpati	66
	Semarang Selatan	37
	Banyumanik	11
	Gajahmungkur	11
	Genuk	52
	Pedurungan	37
	Gayamsari	66
	Semarang Timur	50
	Candisari	39
	Tembalang	91
	Semarang Utara	98
	Semarang Tengah	57
	Semarang Barat	58
	Tugu	26
	Ngaliyan	54
Jumlah Total	2013	790
	2012	790
	2011	174
	2010	179

Sumber : Semarang Dalam Angka 2014

Apabila dilihat dari data yang diperoleh dari tahun 2009-2013, jumlah permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Semarang khususnya gelandangan dan pengemis terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Kota Semarang khususnya Dinas Sosial dalam menangani pertumbuhan jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Semarang dapat dikatakan belum optimal.

Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh dari DATA BASE Dinas Sosial Kota Semarang 2014, diketahui bahwa menurut pendataan jumlah anak jalanan di Kota Semarang tahun 2012 hingga 2014 semester ke-2 mengalami penurunan.

Gambar 1.1 Database Anak Jalanan di Kota Semarang



Sumber : Data Base Dinas Sosial Kota Semarang 2012-2014

Pada tahun 2012 diketahui bahwa jumlah anak jalanan di Kota Semarang sebanyak 210 anak, sedangkan pada tahun 2013 jumlahnya turun menjadi 105 anak. Pada tahun 2014 semester ke-2 jumlahnya turun menjadi 70 anak. Apabila dilihat dari

tren penurunan dari tahun ke tahun sebenarnya dapat dikatakan upaya penanggulangan anak jalanan oleh Dinas Sosial setidaknya mampu mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Semarang. Oleh karena itu, agar target yang diharapkan dalam RENSTRA (Rencana Strategis) tercapai sebaiknya Dinas Sosial berupaya untuk menangani anak jalanan lagi.

Pemerintah Kota Semarang bukannya tanpa usaha dalam mengentaskan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Semarang. Komitmen pun telah dicanangkan melalui perumusan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kota Semarang tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.

Upaya rehabilitasi sosial telah dilakukan Dinas Sosial melalui melalui unit-unit pelayanan teknis (panti/nonpanti), maupun melalui intervensi pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat. Rehabilitasi ini dilakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk memberikan keterampilan anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar tidak bekerja kembali di jalan.

Permasalahan anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan, sebab akar permasalahan ini

ialah masalah kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Primasari YS. SH, M.M. bahwa:

“Pada prinsipnya anak jalanan ini ada ya karena faktor kemiskinan keluarganya. Kemiskinan yang terjadi di keluarga anak jalanan ini karena orang tua mereka yang tidak punya kerjaan, makanya anak-anak jadi turun ke jalan. Semakin banyak keluarga miskin makin banyak pula anak yang beresiko turun kejalan” (Wawancara tanggal 5 April 2017)

Permasalahan terkait penerapan kebijakan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Semarang ini perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui bagaimana kebijakan ini diarahkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

B. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 Kota Semarang tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
2. Menjelaskan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 Kota Semarang tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

C. Teori

1. Administrasi Publik

Menurut *Nicholas Henry* (dalam Pasolong, 2007), administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap

pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

2. Kebijakan Publik

Wilson (dalam Wahab, 2012: 13) merumuskan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah tertentu, langkah-langkah yang telah diambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang terjadi (atau tidak terjadi).

3. Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2012: 135) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

4. Keefektifan 5 Tepat Riant Nugroho

Pada dasarnya terdapat “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu (Nugroho, 2014:686-688):

- a. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan menyangkut seberapa jauh kebijakan yang ada dapat

menyelesaikan permasalahan yang hendak dipecahkan dan bagaimana kejelasan isi kebijakan yang sesuai dengan permasalahan di masyarakat.

b. Ketepatan Pelaksana

Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah, namun juga dapat dilaksanakan melalui kerjasama pemerintah, swasta maupun masyarakat. Ketepatan pelaksana ini dengan melihat pertama yaitu aktor implementasi kebijakan yang berperan penting dalam pelaksanaan Kebijakan. Kedua adalah keterlibatan swasta dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan.

c. Ketepatan Target

Ketepatan target ini berkenaan dengan bagaimana kondisi target dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan apakah implementasi kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang mungkin sama tidak efektifnya dengan kebijakan lain. Ketepatan target dinilai dari respon masyarakat terhadap pelaksanaan Kebijakan oleh implementor dan adanya intervensi mengenai apakah kebijakan tersebut merupakan

kebijakan yang pada prinsipnya terkait pula dengan kebijakan lain yang dilaksanakan oleh implementor sehingga menimbulkan ketidakefektifan.

d. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan ini dilihat dari pertama, adalah lingkungan internal kebijakan mengenai interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan, dengan melihat bagaimana interpretasi lembaga startegis seperti media massa maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan.

e. Ketepatan Proses

Ketepatan proses ini berkenaan dengan bagaimana kesiapan masyarakat dan kesiapan pelaksana kebijakan. Sikap tersebut dilihat dari bagaimana mereka memahami, menerima, dan siap menjadi bagian dari kebijakan.

5. Model Van Meter Van Horn

a. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan

b. Sumber-sumber kebijakan

- c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- d. Karakteristik badan pelaksana.
- e. Kondisi ekonomi, sosial dan politik
- f. Kecenderungan pelaksanaan.

D. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dan menggunakan tipe penelitian eksploratif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya. Tipe penelitian eksploratif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan menemukan informasi mengenai sesuatu masalah yang belum dipahami sepenuhnya oleh seorang peneliti.

2. Situs Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kota Semarang. Untuk melengkapi data primer yang diperlukan, peneliti juga melakukan penelitian data sekunder pada instansi-instansi yang berkompeten dalam hal penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis seperti Dinas Sosial Kota Semarang, serta LSM yang menangani masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung melalui subjeknya. Data Primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari lapangan atau objek penelitian secara langsung. Data tersebut berasal dari daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini disusun dan dikumpulkan melalui Data yang diperoleh melalui studi pustaka, yang berupa bahan-bahan bacaan yang relevan dengan permasalahan Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

c. Informan

Dalam pemilihan informan, penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* ialah suatu metode atau cara pemilihan informan dimana peneliti memilih *key person* sebagai objek yang akan diteliti. Adapun *key person* tersebut ialah Dinas Sosial, LSM terkait, serta target kebijakan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : Wawancara, Observasi dan Dokumentasi

e. Instrumen Penelitian

Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri.

f. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif,

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 Kota Semarang tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Dapat diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan penanganan anak jalanan dan pengemis Dinas Sosial sendiri melakukan beberapa pendekatan penanganan, antara lain dalam mewujudkan tujuan penanganan dilakukan melalui penanganan pencegahan, rehabilitasi sosial, dan penanganan lanjut pasca rehabilitasi yang mana tercantum dalam Pasal 5 – Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kota Semarang. Dinas Sosial melaksanakan tugas pencegahan, assesment, identifikasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Semarang.

Terhusus dalam menangani masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis

Dinas Sosial melakukan patroli dilakukan setiap hari bahkan pada Sabtu dan Minggu juga tetap dilakukan patroli yang biasa dilakukan pada siang hari. Di sana Dinas Sosial melakukan audiensi dengan para PMKS melalui pendekatan persuasi/kekeluargaan tanpa adanya kekerasan dan razia untuk berkomunikasi dan menyarankan agar menghentikan ataupun mengurangi kegiatannya di jalanan/ *traffic light*. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi mereka dari kemungkinan-kemungkinan yang terburuk apabila terus berada di jalanan. Selain itu keberadaan mereka di jalanan sebenarnya kurang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.

Terkait sanksi, sebenarnya telah dilakukan upaya sosialisasi agar masyarakat tidak lagi memberi bantuan secara langsung di jalan, karena menurut pandangan Dinas Sosial apabila masyarakat memberikan uangnya secara langsung kepada mereka maka hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi terbiasa dan menggantungkan pemberian tersebut untuk bertahan hidup. Hal tersebut dipandang sebagai salah satu penyebab anak jalanan, gelandangan dan pengemis enggan menghentikan aktivitasnya di jalan karena lebih mudah mendapatkan hasil dari pada harus bekerja. Adapun permasalahannya

petujuk teknis pelaksanaan dan penerimaan masyarakat terkait sanksi kurang baik.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 Kota Semarang tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

1. Ketepatan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang dinilai belum tepat kebijakan. Hal ini dibuktikan dari belum tercapainya tujuan karena sampai saat ini kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut belum mampu mengatasi permasalahan yang ada. Meskipun demikian, Peraturan daerah ini telah diusahakan untuk dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Sosial Kota Semarang, sebagai pelaksana dan dibantu oleh Satpol-PP maupun dari Yayasan/LSM.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Secara garis besar, fenomena ketepatan pelaksana dapat disimpulkan belum tepat pelaksana karena Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan

dan Pengemis telah dilakukan oleh Dinas Sosial sebagai dalam rangka fungsi pencegahan & rehabilitasi. Peran Satpol-PP yang telah membantu dalam kegiatan berupa penjarangan/ razia masih mengalami berbagai macam kendala.

3. Ketepatan Target

Secara garis besar, Fenomena ketepatan target yang dilihat dari aspek respon target sasaran dapat disimpulkan tidak semuanya pendekatan berhasil dilakukan karena keberhasilan bergantung pada target sasaran itu masing-masing. Selain respon masyarakat, ketepatan target juga dilihat dari aspek intervensi. Sejauh ini ada intervensi dari Dinas Sosial bekerjasama dengan Yayasan Emas Indonesia memberikan bantuan keterampilan bagi binaan serta beasiswa bagi target sasaran yang mau bersekolah.

4. Ketepatan Lingkungan

Fenomena ketepatan lingkungan dari segi ketepatan lingkungan internal sudah tepat, hal ini terlihat dengan pendekatan persuasif atau pendekatan kekeluargaan yang berupa kegiatan sosialisasi & pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial dengan internal organisasi telah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala pada tahap pelatihan yang tidak dilakukan secara berkelanjutan, selanjutnya ialah upaya represif yang dilakukan oleh Satpol-PP berupa razia. Aspek lingkungan eksternal dapat dikatakan sudah tepat karena

interaksi dengan yayasan berjalan dengan baik terlebih melalui FORPAJAS.

5. Ketepatan Proses

Dinas Sosial telah melakukan upaya sosialisasi agar masyarakat tidak memberi bantuan secara langsung di jalan, karena menurut pandangan dari Dinas Sosial apabila masyarakat memberikan uangnya secara langsung kepada mereka maka hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi terbiasa dan menggantungkan pemberian tersebut untuk bertahan hidup sedangkan hal tersebut dipandang sebagai penyebab anak jalanan, gelandangan dan pengemis enggan menghentikan aktivitasnya di jalan.

6. Ukuran dan Sasaran Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena ukuran dan standar kebijakan dapat menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Hal ini dapat dibuktikan dengan Dinas Sosial berpatok pada target Kementerian Sosial yaitu menargetkan untuk bebas anak jalanan pada tahun 2019, dengan target tersebut diharapkan Dinas Sosial Kota Semarang dapat terpacu untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pelaksanaan kebijakan. Adapun masalah yang timbul ialah ketika Dinas Sosial ini sudah melakukan rehabilitasi kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini maka Dinas Sosial harus melepaskannya

kembali dan tidak ada jaminan anak jalanan, gelandangan dan pengemis tersebut kembali turun ke jalan.

7. Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena sumber daya yang dapat dilihat dari aspek sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas merupakan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Hal ini dapat dibuktikan dengan dari aspek sumber daya manusia, Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan masih mengalami keterbatasan jumlah SDM. Pada aspek anggaran, Dinas Sosial mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan dari APBD. Anggaran tersebut dirasa masih kurang karena masih banyaknya masalah yang ada di lapangan sehingga membutuhkan inovasi program kerja dari Dinas Sosial. Pada aspek fasilitas, fasilitas yang dibutuhkan sebagai penunjang implementasi tidak memadai.

8. Komunikasi Antarorganisasi dan pelaksana kegiatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena komunikasi antar organisasi dapat menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pertemuannya difasilitasi

oleh kegiatan FORPAJAS (Forum Peduli Anak Jalanan Semarang) yang merupakan kegiatan koordinasi rutin. Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dalam implementasi penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis tersebut tidak jarang terdapat perbedaan penafsiran.

9. Karakteristik Badan Pelaksana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena karakteristik badan pelaksana dapat menjadi faktor pendorong dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Hal ini dapat dibuktikan dengan Keterbukaan informasi dan kebebasan komunikasi sangat berpengaruh terhadap implementasi.

10. Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena lingkungan ekonomi dan politik dapat menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Hal ini dapat dibuktikan dengan Banyaknya orang tua atau keluarga yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup mengharuskan anak untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan keluarganya dengan cara turun ke jalanan. Budaya memberikan uang

kepada anak jalanan yang dilakukan oleh masyarakat bertentangan dengan program yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi permasalahan anak jalanan, serta political will yang mendukung.

11. Disposisi Pelaksanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena disposisi pelaksanaan dapat menjadi faktor pendorong implementasi Peraturan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Hal tersebut ditunjukkan dengan komitmen yang dibangun untuk melakukan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial sebagai salah satu perwujudan pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya kondisi sosial yang dinamis dalam kehidupan individu dan masyarakat yang dilimuti rasa keselamatan, kesusilaan, keamanan, ketertiban dan ketentraman lahir batin serta memiliki harga diri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa saat ini tujuan yang diharapkan oleh pemerintah dalam mengatasi anak jalanan, gelandangan dan pengemis belum tercapai karena sampai saat ini kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tersebut belum mampu mengatasi permasalahan

yang ada dan masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, Peraturan daerah ini telah diusahakan untuk dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Sosial Kota Semarang, sebagai pelaksana dan dibantu oleh Satpol-PP maupun dari Yayasan/LSM. Dinas Sosial dengan menggunakan pendekatan pencegahan & rehabilitasi melalui sosialisasi & pelatihan-pelatihan yang mana diharapkan dengan adanya pelatihan tersebut dapat mencapai target Kementerian Sosial yang mana mencanangkan bahwa tahun 2019 Indonesia bebas anak jalanan. Namun, program penanganan rehabilitasi tersebut keberhasilannya tergantung pada kemauan dan inisiatif dari peserta pelatihan itu sendiri, karena keberhasilan bergantung pada target sasaran itu masing-masing.

Faktor pendorong penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis:

- *Komitmen Stakeholder.* Dinas Sosial berpatok pada target Kementerian Sosial yaitu menargetkan untuk bebas anak jalanan pada tahun 2019
- Kerjasama dengan komunikasi antar organisasi yang baik.
- Kondisi politik yang stabil dan serta *political will* yang mendukung.
- Adanya Perda yang mengatur.

Faktor penghambat penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis:

- Kuantitas Sumber daya yang tidak memadai.
- Kebiasaan masyarakat yang sulit diubah
- Perekonomian masyarakat yang tidak stabil
- Sifat & mental anak jalanan yang terbiasa hidup di jalanan.
- Tidak jarang terdapat perbedaan penafsiran
- Belum adanya Perwal sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah

B. Saran

1. Penambahan Sumber Daya Manusia, Anggaran, serta Fasilitas
2. Pelaksanaan program pemberdayaan oleh pemerintah yang bersifat berkelanjutan disertai dengan evaluasi pelatihan. Serta melakukan pelatihan berbasis mental (konseling) bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang disertai dengan pemenuhan kebutuhan afeksi. Dengan upaya konseling ini diharapkan mampu merubah mental dan meningkatkan etos kerja dan rasa malu untuk turun ke jalanan.
3. Perlunya pemberdayaan masyarakat dari paling bawah (Sosialisasi ibu PKK) yang bisa dilakukan yaitu dengan sosialisasi untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan

4. Melakukan pendataan *name by address* anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang lengkap (sebagai bahan evaluasi) pelaksanaan kebijakan, sebagai ukuran kebutuhan panti rehabilitasi dan sebagai bahan acuan untuk menetapkan target penanganan.
5. Segera disahkannya Perwal sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan Perda No. 5 tahun 2014 agar dapat segera menerapkan sanksi tegas bagi pengeksploitasi yang mana disertai dengan pengawasan yang rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu Edisi 3*. Jogjakarta: Gavamedia.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Nugroho, Riant. 2014. *Publik Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan Edisi 5*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Herbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Makassar: CV Alfabeta.
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Yogyakarta: Medpress.
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Caps.
- Dokumen :**
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1980
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014
- Kota Semarang
- Semarang Dalam Angka 2014
- Sumber Internet :**
- “Pengertian Anak Jalanan Faktor yang Menyebabkan Munculnya Anak Jalanan”.
<http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-jalanan-faktor-yang.html> . (Diunduh 5 Mei 2017)
- “Meningkatnya Jumlah Anak Gelandangan”
<http://www.mediapedulisosial.ga/2016/07/meningkatnya-jumlah-anak-gelandangan.html> (Diunduh 5 Mei 2017)
- ”Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Makassar”
<http://wdy-z.blogspot.co.id/2013/09/gelandangan-pengemis-anak-jalanan-di.html> (Diunduh 5 Mei 2017)